

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS BARANG-BARANG HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN DI ACEH

PUJI TRI NUZZULI

ABSTRACT

Allah has endowed grace to the Acehnese with abundant agricultural products which have specific quality. Aceh has various natural resources with abundant agricultural products such as Kopi Gayo, nutmegs, patchouli, pepper, clover, Kopi Ulee Kareng, and Pisang Siem. Agricultural products in each area also have their specific or special characteristics which become its superior quality such as their aroma, taste, color, size, and texture so that they can compete with other products of the same types.

Existence of Goods have potency to be protected by the geographical indication at Aceh society in Aceh. Governmental during the time have given an action which are positive in registering of a geographical indication typically Aceh society. Local government after registering of the geographical indication only evaluating one year once local society existence and plantation copy the people, monitoring or perception of only by On duty Plantation in Provinsi Aceh to see how far growth, sale and labialization from this Coffee Gayo. geographical Indication registration to the goods owning to have potency to be registered by a geographical indication in Aceh, Applicant apply to Directorate of Brand of Intellectual Equity General Directorate (HKI) in Banda Aceh which will be by a formality inspection (14 day) [done/conducted] [by] inspection substantive (2 year), agreed to be enlisted (10 day) Announcement (3 month) otherwise there [is] opposition IG enlisted.

Keywords : Registration for Geographical Indication, Agricultural/Plantation Products

I. Pendahuluan

Allah memberikan anugerah kepada masyarakat Aceh yang kaya dengan hasil bumi yang memiliki kualitas yang khas. Alam Aceh memiliki anugerah sumber daya alam yang beraneka ragam sehingga sektor pertaniannya kaya akan berbagai hasil produk pertanian seperti Kopi Gayo, Pala, Nilam, Lada, Cengkeh, Pinang, Kelapa Sawit, Jagung, rotan, tebu, cacao dan Pisang Siem. Produk pertanian yang dihasilkan di setiap wilayah juga memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang menjadi keunggulan produk pertanian dari masing-masing daerah, baik dari sisi aroma, cita rasa, warna, ukuran maupun tekstur yang khas yang merupakan keunggulan daya saing produk tersebut. Kekhususan karakteristik produk tersebut dihasilkan dari pengaruh kondisi alam setempat dan interaksinya dengan masyarakat sekitarnya.

Padahal, kita mengetahui bahwa cukup banyak komoditas pertanian asal Indonesia yang memiliki karakteristik khas dan menjadi keunggulan daya saing dari komoditas sejenis yang dihasilkan oleh negara lain. Dengan sertifikasi indikasi geografis, diharapkan akan diperoleh manfaat yang luas dan cukup. Secara signifikan berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan kelompok tani/masyarakat, percepatan pengembangan wilayah, serta peningkatan daya saing produk dimaksud dipasar domestik maupun internasional. Untuk memperkuat upaya peningkatan daya saing komoditas kopi, pada tahun 2012 fasilitasi terkait dialokasikan kegiatan pengembangan sertifikasi indikasi geografis akan dilaksanakan pada 11 (sebelas) provinsi dengan 13 (tiga belas) lokasi penghasil produk pertanian.¹

Indikasi Geografis adalah salah satu rezim dari Hak Kekayaan Intelektual selain Paten, Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia Dagang dan beberapa jenis HaKI lainnya. IG merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.²

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk IG-nya Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan TRIPs melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (Konvensi Paris 1883).³ Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus mengenai pelanggaran indikasi geografis yang dapat menjadi pelajaran,

¹ <http://www.deptan.go.id/pedoman%20teknis%20pelaksanaan%20indikasi20.pdf>, diakses tanggal 21 November 2013

² Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm . 1.

³ indarahmataullah.wordpress.com/2013/10/25/perindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/ diakses tanggal 1 Desember 2013

yaitu kasus pelanggaran Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Kasus pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh Key Coffee Co. dimulai pada saat pemilik merek “Toarco Toraja” tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 1976.⁴

Indonesia merupakan negara megadiversit dengan keragaman budaya dan sumber daya alami. Dari segi sumberdaya alami banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keterkenalan produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan.⁵ Indikasi Geografis untuk selanjutnya disebut IG ini *TRIPs* telah mengaturnya pada *Section 3 Article 22-24*.⁶ Untuk memastikan adanya perlindungan terhadap IG di negara-negara anggota perjanjian *TRIPs* ini adalah setiap negara anggota diharuskan untuk menyediakan *legal means* atau cara-cara atau upaya hukum untuk melindungi IG dalam hukum nasional mereka.⁷

Trips merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya pengaturan tentang Indikasi geografis yaitu dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasar tempat asalnya itu. Pada umumnya, IG merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal

⁴ Damian, Eddy. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung, Alumni, 2002), hlm. 15.

⁵ Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis* (Jakarta, 2012), hlm. 1.

⁶ F. Scott Kieff and Ralph Nack, 2008, *International, United States and European Intellectual Property Selected Source Material 2007-2008*, Aspen Publisher, USA, page 56

⁷ Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.*, hlm. 33.

yang spesifik, seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen.⁸

Menurut ketentuan TRIPs yang mengatur masalah HaKI secara global, HaKI dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri dari : *copyright and related rights, trademark, geographical indications, industrial design, patents, layout design of integrated circuits, protections of undisclosed information* dan *control of anti competitive Practise in contractual licences*.⁹

Tuntutan adanya perlindungan terhadap IG dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual adalah suatu upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri. Suatu merek yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi geografis yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal. Namun demikian, di Indonesia belum memiliki instrumen yang mengatur IG sebagai komponen HaKI.¹⁰ Alfons mengemukakan, dalam faktor substansi hukum, indikasi geografis tidak dicantumkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum di bidang indikasi geografis sangatlah tidak memadai. Selain itu, faktor struktur juga sangat berpengaruh terhadap pendaftaran IG oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena para pejabat yang terkait di bidang tersebut belum melakukan sosialisasi yang optimal dan ini berakibat pada faktor kultur yaitu masyarakat tidak melakukan pendaftaran terhadap IG karena mereka tidak tahu konsep indikasi geografis tersebut.¹¹

Perubahan sosial ini berdampak dalam bidang ekonomi yakni dengan terbentuknya perdagangan bebas. Salah satu isu yang menyerukan pada era perdagangan bebas ini adalah dalam bidang Hak Kekayaan intelektual. Permasalahan ini mengemuka dikarenakan Hak

⁸Anida Ramasari, "*Hak Kekayaan Intelektual*", <http://annida.harid.web.id/?p=358>, diakses tanggal 26 Juli 2013.

⁹Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan HaKI*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1989), hal 1

¹⁰Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), 2008), hal.19.

¹¹Alfons dalam Prasetya Online, *Melindungi HAKI Produk Lokal dengan Implementasi Indikasi Geografis*, <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Melindungi-HAKI-Produk-Lokal-dengan-Implementasi-Indikasi-Geografis-1661-id.html>, diakses tanggal 26 Juli 2013.

Kekayaan Intelektual merupakan bidang yang tidak terpisahkan dari persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia.¹²

Obyek indikasi geografis seharusnya dibatasi pada hasil alam saja. Karena sesuatu seharusnya disebut sebagai indikasi geografis jika keunikan, keistimewaan, atau keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk sejenis lain lahir dari bumi (*geo*) tempat produk tersebut berasal. Jika yang hendak ditonjolkan adalah manusianya, maka *folk* adalah kata yang lebih tepat. Oleh karena itu, di masa mendatang sebaiknya pengaturan tentang indikasi geografis ini dirubah.¹³

Terdapat kekhasan yang ditonjolkan dari dua pengertian tersebut. Merek yang lebih menonjolkan simbol dan IG yang lebih menonjolkan kepada hasil alam yang dihasilkan oleh suatu daerah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sudaryat, dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa IG digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah:¹⁴

1. Tempat dan daerah asal
2. Kualitas dan karakteristik produk
3. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat asal barang.

Adapun permasalahan dalam pene;otian ini adalah sebgai berikut :

1. Bagaimana keberadaan barang berpotensi untuk dilindungi indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Aceh?
2. Bagaimana pendaftaran indikasi geografis atas barang-barang yang memiliki berpotensi untuk didaftarkan indikasi geografis di Aceh?

Maka sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan pene;itian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Aceh.

¹² Budi Agus Riswadi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah Hak Kontemporer* (Yogyakarta: Gita Nagari, 2006), hlm. 1.

¹³ Brian Prastyo. <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008/04/09/merek-dan-indikasi-geografis/> diakses tanggal 21 Januari 2014

¹⁴ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual* , (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 178.

2. Untuk mengetahui pendaftaran indikasi geografis atas barang-barang yang memiliki berpotensi untuk didaftarkan indikasi geografis di Aceh.

I. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan-kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. *Yuridis empiris* adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi yuridis normatif berusaha menemukan proses bekerjanya hukum¹⁵

Penentuan Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*) dan diperkirakan dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti. Sampel tersebut juga diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terlibat dalam penelitian ini. Responden adalah, Pimpinan/Pemilik Usaha/Petani, Pihak Pemerintah Daerah, Departemen Perdagangan dan Perindustrian Aceh, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 52.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat interview adalah bebas terpimpin. Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data melalui dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini.

Data skunder dalam penelitian ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu UU Merek No 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang IG dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- b. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel-artikel, internet, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, serta Kamus Bahasa Belanda.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia saat ini, dasar hukum IG mengacu pada Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2007 Tentang IG.

Pasal 56 UU Merek menyatakan “IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”. Selanjutnya dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa IG mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat yang menghasilkan barang, lembaga yang diberi kewenangan atau kelompok konsumen. Manfaat IG didaftarkan, perlindungan IG memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, manfaat keberadaan IG dari sisi ekonomi antara lain, mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain, Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat, memberikan perlindungan dari pemalsuan produk, meningkatkan pemasaran produk khas, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, penunjang pengembangan agrowisata, menjamin keberlanjutan usaha, memperkuat ekonomi wilayah, mempercepat perkembangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Dalam hal pendaftaran IG, IG secara khusus semua diatur dalam PP nomor 51 tahun 2007 tentang IG. IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda yang dimaksud adalah nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang, hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya dengan syarat IG dilindung apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum IG di Direktorat Jenderal.dan memenuhi syarat indikasi

¹⁶ Wawancara dengan Jailani M. Ali Kabid. Pelayanan Umum Depkum HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Desember 2013

geografis. Dalam syarat IG yang dapat melakukan permohonan pendaftaran adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan.¹⁷

Syarat untuk dapat didaftarkan sebagai IG, yaitu:¹⁸

- a. Merupakan barang
- b. Adanya faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya dari suatu barang. Berarti disini menunjukkan letak geografis dari mana barang dihasilkan.
- c. Memiliki ciri dan kualitas tertentu atau lebih tepatnya memiliki reputasi, yang telah dikenal tidak hanya dalam negeri saja, melainkan sampai keluar negeri.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Merek dan Pasal 2 ayat (2) PP Indikasi Geografis, dari segi obyek maka dapat dilindungi sebagai indikasi geografis, yaitu:¹⁹

1. Barang-barang yang dihasilkan oleh alam
2. Barang-barang hasil pertanian
3. Hasil kerajinan tangan
4. Hasil industri tertentu

Bekerjanya IG dalam menggerakkan perekonomian, IG pada prakteknya dikenali oleh konsumen sebagai tanda tempat asal suatu barang dimana ciri khas dan kualitas diketahui berbeda dengan barang serupa yang berasal dari daerah lain, Konsumen biasanya lebih tertarik dan rela membayar diatas harga normal karena originalitas (keasliannya), kualitas dan reputasi yang melekat pada barang tersebut.²⁰

Pada Pasal 56 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2007 tentang IG menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan adalah :

- a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang/yang bersangkutan yang terdiri atas :
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;

¹⁷ Wawancara dengan Jailani M. Ali Kabid. Pelayanan Umum Depkum HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Desember 2013

¹⁸ Andrian Suteja, *Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 162.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

- 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau kekayaan alam;
- 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
- c) Kelompok konsumen barang tersebut.

Perlindungan IG pada dasarnya tidak terbatas pada produk pertanian saja, semua produk yang memiliki keterkaitan dengan faktor geografis termasuk faktor alam dan/atau manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas serta telah dikenal keberadaannya dapat dilindungi dengan IG.

Dengan demikian, yang dapat membedakan produk IG dan bukan produk IG adalah dominasi yang membentuk ciri khas dan kualitas, jika ciri khas dan kualitas lebih didominasi faktor manusia maka bisa dipastikan produk tersebut bukan produk IG. Contohnya, Bika Ambon Medan, Gudeg Jogja, Soto Betawi, Bakpia Patuk dan Batik Jogja. Walaupun IG hanya menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor geografis memberikan ciri atau kualitas tertentu, tidak semua permohonan pendaftaran IG dapat diterima untuk didaftar karena permohonan pendaftaran IG ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:

- a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya;
- b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai IG.²¹

Walaupun ada kemungkinan pendaftaran IG ditolak oleh Direktorat Jenderal, terhadap penolakan tersebut dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Sementara itu, ketentuan mengenai banding terhadap penolakan pendaftaran merek berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran IG.²²

Dalam hal terjadi pelanggaran IG, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan, maka dikenal pula penetapan sementara yang berlaku terhadap

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 75.

²² *Ibid.*, hal. 75.

pelanggaran hak atas merek berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas IG.²³

Apa pemerintah selama ini telah memberikan suatu tindakan yang positif dalam didaftarkanya suatu IG, pemerintah daerah setelah didaftarkanya IG tersebut hanya melakukan peninjauan sekali dalam setahun keberadaan masyarakat desa dan perkebunan kopi. Monitoring atau pengamatan hanya dilakukan oleh Dinas Perkebunan di Aceh untuk melihat sejauh mana perkembangan, penjualan dan labelisasi dari kopi arabika gayo tersebut.²⁴ Pengawasan terhadap pemakai indikasi geografis: tim ahli indikasi geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian IG di wilayah Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan. Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari: lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah atau pusat, dan atau lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam Melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh IG.²⁵

Pengaturan IG dalam instrumen hukum internasional sangat penting untuk menjadi *guidelines* bagi hukum nasional dalam mengatur mengenai perlindungan IG ini. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya.²⁶ Ketentuan mengenai IG diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisabon, TRIPs dan sebagainya. Menurut I Wayan Parthiana, kehadiran perjanjian internasional akan membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.²⁷

²³ *Ibid*

²⁴ Wawancara dengan Ibrahim Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues, tanggal 29 Desember 2013

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), hlm. 107.

²⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hal 12

Langkah-langkah guna mendapatkan perlindungan IG untuk Kopi Gayo. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan serta dilakukan secara bersama oleh semua pihak agar perlindungan IG kopi Gayo dapat terwujud antara lain melakukan Sosialisasi, Sosialisasi akan manfaat adanya perlindungan indikasi geografis pada masyarakat dataran tinggi Gayo sangat perlu dilakukan, agar masyarakat tidak salah mengerti akan adanya IG. Peran sosialisasi ini dapat dilakukan oleh Dinas terkait, Forum Kopi Aceh dan lembaga-lembaga lainnya. Membentuk Masyarakat IG Setelah masyarakat mengetahui dengan benar terhadap perlindungan indikasi geografis, saatnya membentuk Masyarakat IG Dataran Tinggi Gayo. Studi, para akar juga terlibat dalam melakukan study tentang hubungan faktor geografis terhadap mutu kopi yang dihasilkan di dataran tinggi Gayo. Verifikasi, dalam tahapan ini, verifikasi/validasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dan Batas Wilayah, penentuan batas wilayah geografis yang akan mendapat perlindungan IG, dilakukan oleh masyarakat serta dibantu oleh para pakar/ahli.²⁸

Kekhususan atau kekhasan yang dimiliki oleh kopi Gayo sehingga patut untuk memperoleh sertifikat hak atas indikasi geografis. Kopi Gayo, memiliki karakteristik dan ciri khas, berbeda dengan kopi yang ditanam di tempat lain. "Kopi Gayo disukai oleh konsumen di Belanda." Selain Kopi Gayo, Kopi Toraja juga diketahui sudah didaftarkan sebagai merek dagang oleh pengusaha di Jepang. Rugikan eksportir. Pendaftaran IG sebagai merek dagang dinilai merugikan pengusaha yang berasal dari daerah yang bersangkutan bila mereka ingin mengeksport komoditas itu ke Jepang atau ke Belanda. Kopi Gayo berpotensi didaftarkan sebagai produk IG karena unik dan memiliki karakteristik.²⁹

Upaya pemerintah Aceh untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah yang berkelanjutan, pemerintah tidak hanya mengandalkan sektor industri berbasis padat teknologi, tetapi berupaya mengembangkan investasi berbasis bahan baku lokal (*Local based Investment*) dengan pendekatan yang dilakukan mengacu pada konsep pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal aspek penanganannya meliputi :

²⁸ Wawancara dengan Jailani M. Ali Kabid. Pelayanan Umum Depkum HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Desember 2013

²⁹ *Ibid*

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, yang diiringi dengan upaya peningkatan kualitas produksi dan pengembangan pemasaran hasil produksi dan produk unggulan daerah.
2. Pelibatan dan peningkatan daya saing (keahlian) dan jiwa kewirausahaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam
3. Peningkatan dan pengembangan daya dukung sumber daya buatan (prasarana dan sarana) dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan kualitas masyarakat.³⁰

Penegakan hukum terhadap pelanggaran indikasi geografis, Indonesia telah diatur dalam UU Merek Nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang IG, yaitu dapat berupa penegakan hukum diluar Pengadilan dan penegakan hukum melalui jalur pengadilan.

a. Penegakan hukum di luar pengadilan

Dalam Pasal 84 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, memberikan peluang penegakan hukum bila terjadi pelanggaran IG dengan menempuh alternative penyelesaian sengketa melalui arbitrase bahkan sangat dimungkinkan melalui jalur mediasi dengan memakai mediator. Penyelesaian melalui alternative penyelesaian sengketa ini lebih efektif dan efisien dibanding dengan penyelesaian melalui jalur penegakan hukum di pengadilan, karena waktu dan biaya tidak begitu lama dan mahal, tergantung kemampuan dari pihak yang bersengketa.

b. Penegakan hukum melalui jalur pengadilan

Penegakan hukum melalui pengadilan ada 2 (dua) sistem peradilan yang dapat ditempuh, yaitu : sistem peradilan perdata dan sistem peradilan pidana. Penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan perdata pada prinsipnya berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, untuk perbuatan melawan hukum tuntutan dapat berupa ganti rugi dan atau tuntutan supaya tidak lagi memakai indikasi geografis. Sedangkan gugatan dengan dasar wanprestasi tuntutan berupa pemenuhan prestasi.

³⁰ Wawancara dengan Jailani M. Ali Kabid. Pelayanan Umum Depkum HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Desember 2013

Asal mulanya Kopi Gayo sehingga dapat menganggap kopi Gayo memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dapat didaftarkan sebagai Hak kekayaan intelektual Kopi Gayo telah sejak zaman dahulu kala dan terkenal Kopi Arabika, para peneliti dari berbagai daerah dan luar negeri khususnya Belanda yang mendaftarkan Kopi Gayo ke Hak Kekayaan Intelektual tahun 2008, dari sana kami mengerti bahwa kopo gayo ini termasuk dalam indikasi geografis dan wajib didaftarkan sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya kota Gayo Lues.

Pemerintah selama ini telah memberikan suatu tindakan yang positif dalam didaftarkannya suatu IG khas masyarakat Aceh. Pemerintah daerah setelah didaftarkannya IG tersebut hanya meninjau setahun sekali keberadaan masyarakat setempat dan perkebunan kopi rakyat, monitoring atau pengamatan hanya dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melihat sejauh mana perkembangan, penjualan dan labelisasi dari Kopi Gayo ini. Selain itu pemerintah juga mendirikan koperasi di wilayah desa kami dengan koperasi Serba Usaha yang lahir dari Lembaga Keuangan di Kampong sebagai penghasil kopi Gayo memiliki 75 kepala keluarga yang keseluruhannya sangat bergantung kepada hasil penjualan kopi Gayo, selain itu keberadaan Koperasi sangat mempengaruhi, karena beradaan koperasi adalah tempat penjualan hasil pertanian kampong disini.³¹

Komoditas pertanian di Aceh berdasarkan luas lahan yang ada untuk penanaman komoditas pertanian, kemudian berdasarkan produksi panen hanya komoditas padi, kopi, dan lada yang menghasilkan lebih banyak dibanding palawija lain, sayuran dan tanaman hias. Sebenarnya atas potensi produk yang menonjol tersebut, ada potensi untuk perlindungan IG-nya, dengan memperhatikan karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki katagori sama berupa ciri khas, sifat-sifat khusus dan cita rasa yang berbeda dan hanya terdapat/ada di daerah Banda Aceh. Pengupayaannya dengan menerapkan pola pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pada pengelolaan manajemen kopi (yang telah mendapat reputasi internasional atas IG) di Indonesia baik kopi Robusta maupun kopi Arabika. Pola pengembangan juga harus melibatkan rakyat mulai dari peremajaan, rehabilitasi dan perluasan tanaman padi, jagung

³¹*Ibid*, Wawancara dengan Tgk. Hasan Basri

maupun kacang tanah. Dari beberapa pengalaman IG atas produk pertanian, pengupayaan di atas dapat dilakukan setidaknya secara nasional yang memegang atas perlindungan IG-nya.³²

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya hak kekayaan intelektual, dalam hal sosialisasi IG, pemerintah sendiri mengakui masih kekurangan sumber daya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai indikasi geografis. Pemerintah sering menyelenggarakan seminar dengan mengundang ahli Hak Kekayaan Intelektual dari luar Aceh dan mengundang masyarakat umum sebagai peserta. Program pemerintah untuk terjun langsung ke desa-desa terpencil untuk memberikan penyuluhan telah sering dilakukan.³³

³² Wawancara dengan Jailani M. Ali Kabid. Pelayanan Umum Depkum HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Desember 2013

³³ Wawancara dengan Iskandar Kabid Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2013

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Keberadaan barang berpotensi untuk dilindungi indikasi geografis pada masyarakat Aceh di Aceh. Pemerintah selama ini telah memberikan suatu tindakan yang positif dalam didaftarkannya suatu indikasi geografis khas masyarakat Aceh. Pemerintah daerah setelah didaftarkannya indikasi geografis tersebut hanya meninjau setahun sekali keberadaan masyarakat setempat dan perkebunan kopi rakyat, monitoring atau pengamatan hanya dilakukan oleh Dinas Perkebunan di Provinsi Aceh untuk melihat sejauh mana perkembangan, penjualan dan labelisasi dari Kopi Gayo ini.
2. Pendaftaran indikasi geografis atas barang-barang yang memiliki berpotensi untuk didaftarkan indikasi geografis di Aceh, Pemerintah daerah setelah didaftarkannya IG tersebut hanya meninjau setahun sekali keberadaan masyarakat setempat dan perkebunan kopi rakyat, monitoring atau pengamatan hanya dilakukan oleh Dinas Perkebunan di Aceh untuk melihat sejauh mana perkembangan, penjualan dan labelisasi dari Kopi Gayo ini

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HAKI kepada masyarakat dan perbaikan kinerja dari penegak hukum dalam prosedur ataupun penindakan atas pelanggaran HaKI, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HaKI dan agar penggiat industri kreatif bisa lebih maksimal dalam berkarya.

2. Hendaknya masyarakat dapat membekali dirinya dengan pengetahuan mengenai perlunya pendaftaran Indikasi Geografis, sehingga perlindungan-perlindungan yang diberikan undang-undang dan Peraturan Pemerintah dapat dinikmati. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia adalah pemerintah membentuk undang-undang tentang indikasi geografis secara terpisah atau berdiri sendiri.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Ayu, Miranda Risang, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, 2006
- Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002
- Kesowo, Bambang, *GATT, TRIPs dan HaKI*, Jakarta: Mahkamah Agung, 1989
- Miru, Ahmad, *Hukum Merek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Noorsaman, Andy Sommeng dan Damar Sasongko, Agung, *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), 2008
- Parthiana, Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Ralph Nack, dan F. Scott Kieff, *International, United States and European Intellectual Property Selected Source Material 2007-2008*, Aspen Publisher, USA
- Riswadi, Budi Agus dan Sumartiah, Siti, *Masalah-masalah Hak Kontemporer*, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006
- Septiono, Saky, *Perlindungan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2012
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984
- Suteja, Andrian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007

B. Internet

Alfons dalam Prasetya Online, *Melindungi HAKI Produk Lokal dengan Implementasi Indikasi Geografis*, <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Melindungi-HAKI-Produk-Lokal-dengan-Implementasi-Indikasi-Geografis-1661-id.html>, diakses tanggal 26 Juli 2013.

Anida Ramasari, *"Hak Kekayaan Intelektual"*, <http://annida.harid.web.id/?p=358>, diakses tanggal 26 Juli 2013

Brian Prastyo. <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008/04/09/merek-dan-indikasi-geografis/> diakses tanggal 21 Januari 2014

Indrarahmataullah.wordpress.com/2013/10/25/perindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/diakses tanggal 1 Desember 2013

C. Wawancara

Wawancara dengan Jailani M. Ali Kabid. Pelayanan Umum Depkum HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Desember 2013

Wawancara dengan Ibrahim Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues, tanggal 29 Desember 2013

Wawancara dengan Tgk. Hasan Basri, tanggal 1 Desember 2013

Wawancara dengan Jailani M. Ali Kabid. Pelayanan Umum Depkum HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Desember 2013

Wawancara dengan Iskandar Kabid Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2013

Wawancara dengan Ibrahim Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues, tanggal 29 Desember 2013